



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai acuan referensi. Penelitian pertama terkait kasus penyadapan alat komunikasi yang terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Sedangkan, penelitian kedua berhubungan dengan pemberitaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian terdahulu ini dipilih untuk membantu peneliti untuk melihat permasalahan yang ingin diteliti lebih luas.

Penelitian pertama berjudul *Kekebalan Alat Komunikasi Perwakilan Diplomatik Di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Alat Komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar)*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2007 oleh Nancy Safine mahasiswi jurusan Hukum Internasional Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Hukum.

Skripsi yang dilakukan Nancy Safine menggambarkan situasi ketika kekebalan diplomatik dilanggar oleh negara penerima. Padahal, kewajiban negara penerima adalah untuk memberikan perlindungan bagi pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya, termasuk kebebasan berkomunikasi.

Penelitian pertama ini ingin menganalisa tentang penafsiran terhadap Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan kekebalan alat komunikasi Kedutaan

Besar suatu negara di negara penerima. Selain itu, ingin menganalisa upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pemerintah Indonesia atas penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar.

Di dalam upaya mengetahui bagaimana penafsiran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai pengaturan tentang kekebalan alat komunikasi, mahasiswi Fakultas Hukum ini mempergunakan metode pendekatan berupa metode yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder sebagai metode pengumpulan data. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, sedangkan data penunjang adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara terhadap instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara.

Untuk memperoleh data yang valid, data yang diperoleh akan dianalisa oleh peneliti. Teknik yang digunakan oleh Nancy Safine adalah teknik analisa badan hukum melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Berdasarkan hasil penelitian, Nancy Safine memperoleh jawaban atas kasus penyadapan tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang kekebalan berkomunikasi. Di dalam pasal tersebut berisikan bahwa

negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi. Ketentuan tersebut jelas-jelas dilanggar oleh Myanmar.

Mahasiswi jurusan Hukum Internasional Universitas Brawijaya ini juga menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar mengutuk perbuatan dari pemerintah Myanmar yang melakukan segala cara untuk mengetahui rahasia negara Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk menyampaikan protes Indonesia kepada pemerintah Myanmar yang selanjutnya dilakukan perundingan dengan pemerintah Myanmar. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara diplomatik sehingga menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian kedua berjudul *Konstruksi Berita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Terkait Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Harian Surat Kabar Media Indonesia dan Kompas (sebuah studi framing)*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2011 oleh Albertus Magnus Prestianta mahasiswa Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi.

Penelitian kedua ini membahas penyalahgunaan kekuasaan yang dikontekskan pada wewenang yang dimiliki oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam informasi kawat rahasia Amerika Serikat yang bocor di situs Wikileaks. Susilo Bambang Yudhoyono diduga menggunakan wewenangnya untuk mengintervensi penyidik (Jaksa Agung), menggunakan alat negara (Badan Intelijen Negara) untuk kepentingan pribadinya. Kawat rahasia Kedubes AS ini bocor, lalu diberitakan oleh media (*Media Indonesia*, 12 Maret 2011: “SBY Dituding”).

Penelitian yang dilakukan Albertus Magnus Prestianta ini membahas konstruksi berita yang digunakan Harian Surat Kabar *Media Indonesia* dan *Kompas* dalam memberitakan dugaan penyalahgunaan kekuasaan presiden SBY juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi berita pada harian Harian Surat Kabar *Media Indonesia* dan *Kompas* terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan presiden SBY.

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis *framing* Robert N. Etman sebagai alat analisisnya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kedua ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang terdiri dari teks berita surat kabar *Media Indonesia* dan *Kompas* mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terbit sejak 12 Maret 2011 sampai 17 Maret 2011. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan praktisi media (Ninok Leksono, Redaktur Senior Harian *Kompas* dan Ade Alawi, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Harian *Media Indonesia*).

Hasil dari penelitian Albertus Magnus Prestianta menunjukkan adanya *frame* yang berbeda antara *Media Indonesia* dan *Kompas* dalam memberitakan dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Media Indonesia* memfokuskan masalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai masalah politik. Presiden dikonstruksikan sebagai orang yang reaktif seperti “kebakaran jenggot”, hanya bisa mengecam

tanpa memberikan bukti berupa data-data yang pasti, emosional, dan lambat dalam mengatasi masalah ini sehingga dapat memunculkan opini dan spekulasi di masyarakat. Presiden sebagai pemimpin harus bisa memberikan kebenaran atas dugaan tersebut, sebab presiden memegang amanah kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan rakyat untuk mengatur jalannya negara. *Media Indonesia* terkesan menekan pemerintah dalam pemberitaannya.

Berbeda dengan *Media Indonesia*, *Kompas* memfokuskan masalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai masalah politik yang tidak bisa lepas dari urusan moral. *Kompas* mengonstruksikan presiden sebagai sosok yang juga manusia. Meski ini merupakan masalah politik, *Kompas* juga memperhatikan unsur moral, bahwa sesama manusia tidak perlu menuduh, memojokkan. Asas praduga tak bersalah menjadi perhatian *Kompas*, jika belum terbukti kebenarannya maka jangan langsung menyerang karakter seseorang dalam berita. *Kompas* berusaha hati-hati untuk tidak menyinggung pihak manapun.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi media dalam mengonstruksikan berita adalah faktor ideologi, ekstramedia, organisasi, rutinitas, media, dan wartawan. Masing-masing memiliki falsafah, ciri, visi dan misi yang mempengaruhi produksi berita. Wartawan memang memiliki perspektifnya masing-masing dalam memahami peristiwa. Akan tetapi perspektif wartawan itu sudah dipengaruhi oleh falsafah, ciri, visi dan misi dalam organisasi media di mana dia berada. Media massa secara rutin mengadakan rapat redaksi untuk merencanakan, menyusun, dan menetapkan berita yang akan

diterbitkan. Setiap organisasi media pasti memiliki perbedaan. *Media Indonesia* dan *Kompas* memiliki falsafah, ciri, visi dan misi yang berbeda yang menentukan lahirnya berita. Masing-masing media memunculkan cirinya untuk memperoleh pembaca sebanyak-banyaknya, sehingga dengan semakin banyak pembaca maka pengiklan yang masuk bertambah.

Kedua penelitian terdahulu itu memiliki poin penting yang diambil penulis, termasuk persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya adalah penelitian pertama mengambil kasus penyadapan alat komunikasi. Perbedaan dengan penelitian pertama adalah perspektif yang dipakai. Dengan pengambilan isu yang sama, penulis bisa melihat bagaimana Pemerintah Indonesia yang waktu itu juga dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani persoalan ini. Hasilnya, cara-cara diplomatik ditekankan untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak memperkeruh hubungan kedua negara. Cara penanganan ini juga tak jauh berbeda dengan penanganan Presiden Yudhoyono terkait penyadapan terhadap dirinya dan pejabat lainnya, meski cara yang dilakukan justru lebih tegas dibandingkan kasus penyadapan di KBRI Myanmar. Meski tak begitu ditonjolkan bagaimana penyelesaian konflik karena Nancy memakai perspektif hukum, penyelesaian ini dapat menjadi referensi bagaimana penulis melihat persoalan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia.

Sedangkan, penelitian kedua mempunyai persamaan pada salah satu tujuan penelitiannya, yaitu ingin mengonstruksi suatu pemberitaan. Selain itu, jenis dan metode penelitian serta metode pengumpulan data juga sama dengan yang

dilakukan peneliti. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian kedua adalah teknik analisis data.

Penelitian yang dilakukan Albertus Magnus Prestianta adalah bentuk kritis akan Pemerintahan Presiden Yudhoyono. Meski memiliki perbedaan fokus topik, penulis menemukan kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil analisis frame Media Indonesia yang menggambarkan Presiden Yudhoyono sebagai orang yang reaktif seperti “kebakaran jenggot”. Hal ini juga yang ditemukan penulis terkait pemberitaan penyadapan ini. Ketika isu tersebar bahwa Australia menyadap Indonesia, sikap Pemerintah Indonesia masih cenderung ragu, karena terus menunggu konfirmasi jelas dari Australia yang tak kunjung diberikan. Namun, tiba-tiba setelah muncul nama “korban” penyadapan yang salah satunya menyebut nama Presiden Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, mendadak Pemerintah Indonesia mengecam adanya penyadapan.

2.2 Konsep Surat Kabar

Keberadaan surat kabar sangat dipengaruhi oleh penemuan mesin cetak. Turow (2009:300) menjelaskan mesin itu ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan 1400. Mesin cetak itu memungkinkan untuk memproduksi surat kabar hingga orang-orang berlomba-lomba untuk mendirikan penerbitan surat kabar.

Secara umum, Oetama (2001:327) menjelaskan bahwa isi surat kabar senantiasa apa yang benar terjadi dalam masyarakat sebagai peristiwa fisik yang menempati ruang dan waktu maupun sebagai kejadian abstrak yang mengambil

tempat di dalam otak dan hati masyarakat. Melalui peliputan tentang peristiwa yang jatuh dari langit (*spot news*) dan yang digali (*trend news*), diperoleh gambaran jelas tentang interaksi yang berlangsung setiap hari antara surat kabar dan masyarakat.

Lebih jelasnya, Roy (2011:16-20) menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan surat kabar. Ia mengatakan bahwa surat kabar adalah tulisan yang beredar harian atau mingguan berisi laporan peristiwa yang baru saja terjadi atau yang akan terjadi.

Meskipun surat kabar menjangkau pembacanya lebih lambat dibandingkan pemberitaan media lain, surat kabar memiliki keunggulan tersendiri. Roy memaparkan, pembaca surat kabar diberi kebebasan untuk memilih berita yang menarik baginya, dan membacanya sesuai waktu luang mereka dan preferensi mereka masing-masing.

Ada beberapa tipe surat kabar, yaitu:

- Surat Kabar Harian

Surat kabar jenis ini mencakup semua jenis berita dari berbagai negara-negara di dunia, serta kejadian penting di negara sendiri. Selain itu, berita yang akan dimuat juga mencakup mengenai komunitas, bisnis, olahraga, juga berita hiburan. Umumnya, halaman depan surat kabar harian dikhususkan untuk memberitakan peristiwa penting dalam 24 jam terakhir atau yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

- Surat Kabar Mingguan

Liputan mengenai peristiwa lokal adalah tujuan utama dari surat kabar mingguan yang terbit di kota-kota kecil, kota pinggiran atau area komunitas dalam kota. Surat kabar ini hanya menguasai salah satu elemen berita sehingga tidak menyajikan informasi terlalu detail. Informasi yang juga menjadi fokusnya adalah berita personal dan peristiwa dalam komunitas mereka.

- **Surat Kabar Khusus**

Surat kabar ini diterbitkan secara regular, dan memberi informasi yang menyangkut suatu kelompok atau situasi khusus. Misalnya, surat kabar perusahaan.

- **Surat Kabar dalam Institusi Pendidikan**

Seperti layaknya surat kabar mingguan, ada surat kabar yang dioperasikan dalam sekolah atau universitas. Surat kabar ini menyampaikan informasi mengenai institusi mereka sendiri seperti acara sekolah, artikel mengenai siswa dan guru. Surat kabar ini terbit setiap bulan, mingguan, dua atau tiga mingguan, atau bahkan harian.

2.3 Konsep Berita

Mendefinisikan kata ‘berita’ tidaklah mudah. Burns (2013:51) mengatakan bahwa kata tersebut telah digunakan setidaknya 500 tahun—jauh sebelum kehadiran surat kabar di masyarakat.

Burns (2013:52) menyebutkan bahwa tidak ada peraturan yang baku yang menjelaskan pengertian ‘berita’, karena terlalu banyak variabel yang harus

diprediksi. Rolnicki, Tate, Taylor (2008:2) mengungkapkan hal yang serupa. Belum kriteria jelas untuk berita. Sebab menurut mereka, secara keseluruhan teks berita tidak selalu tentang peristiwa terbaru. Sering kali paragraf pertama dan beberapa paragraf selanjutnya memuat fakta dan opini yang membuat berita lama menjadi baru kembali. Lagipula berita baru memiliki daya tarik dan arti penting bagi pembaca. Ada banyak variabel yang menyebabkan hal itu, preferensi personal salah satunya. Itu sebabnya, kadang-kadang sebuah berita yang menempati tempat utama di koran atau televisi atau radio sering kali tidak amat penting bagi kebanyakan pembaca atau pendengar. Namun, editor memutuskan untuk mengutamakan berita tersebut karena berita itu memiliki karakteristik unik, dan terkadang mengandung konflik.

Dalam menjelaskan pengertian berita, Mencher (2011:55) mengungkap opini berbeda dari tiga jurnalis:

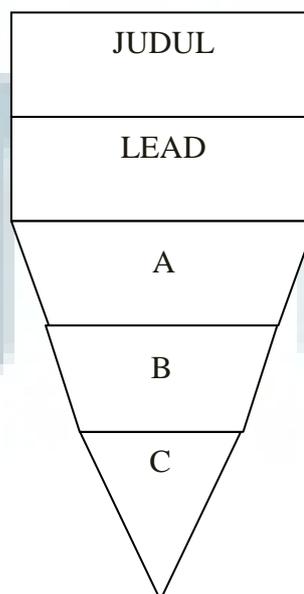
Tabel 2.3 Tiga Pandangan Mengenai Berita

Burton Rascoe, <i>Chicago Tribune</i> , 1920-an	“Insting untuk menentukan sebuah berita adalah insting yang paling penting. Insting itu menentukan bagian mana yang vital, mana yang paling berwarna, dan bagian mana yang hidup. Itulah hal-hal yang menarik perhatian orang. Itulah jurnalistik.”
Stuart Garner, <i>Thomson Newspapers</i> , 1980-an	“Sisi <i>marketing</i> mungkin saja menjadi raja dari semua editor. Seharusnya para editor melupakan apa yang pernah dipelajarinya di universitas, cari apa yang benar-benar pembaca inginkan dan berikan pada mereka.”
Gerry Goldstein, <i>The Providence Journal</i> , 1990-an	“Berita adalah kebenaran, dan itulah persoalannya.”

Secara garis besar, ada dua jenis berita. Menurut Rolnicki, Tate, Taylor (2008:2), berita dapat didefinisikan sebagai “*hard news*” atau “*soft news*”. *Hard news* (berita hangat) punya arti penting bagi banyak pembaca, pendengar dan pemirsa karena biasanya berisi kejadian yang “terkini” yang baru saja terjadi atau akan terjadi di pemerintahan, politik, hubungan luar negeri, pendidikan, ketenagakerjaan, agama, pengadilan, pasar finansial, dan sebagainya.

Oleh karena itu struktur berita lugas itu berbentuk piramida terbalik. Pola ini, menurut Putra (2007:51), sangat cocok bagi pembaca yang tergesa-gesa, dan tidak mencari kedalaman berita (*in depth news*). Sebab, menyajikan urutan informasi yang paling penting hingga kurang penting. Ishwara (2007:117) mengatakan bahwa berita yang dibuat dengan gaya demikian memungkinkan untuk dipotong secara drastis tanpa harus ditulis ulang sehingga membuat pekerjaan lebih mudah.

Gambar 2.3 Struktur piramida terbalik

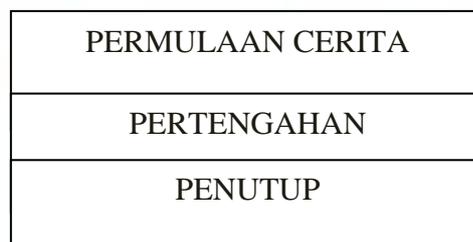


Dari struktur itu, bagian A, B, C adalah tubuh berita yang semakin ke bawah akan semakin tidak penting.

Rolnicki, Tate, Taylor (2008:2) memamparkan bahwa *soft news* (berita ringan) biasanya kurang penting karena isinya menghibur, walau kadang juga memberi informasi penting. Berita jenis ini sering kali bukan berarti terbaru. Di dalamnya memuat berita *human interest* atau jenis rubrik *feature*. Berita jenis ini lebih menari bagi emosi dibandingkan akal pikiran.

Dalam penyajian informasi dan hiburan itu, perlu diperhatikan struktur penulisan berita halus agar berita mudah dibaca. Struktur yang dipakai dalam penulisan ini adalah pola segi empat. Menurut Putra (2006:53), pola penulisan ini menggambarkan struktur yang seimbang di bagian-bagiannya. Informasi yang disampaikan dalam penulisan berita ini tak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga menuntut pembaca untuk menyelesaikan keseluruhan berita.

Gambar 2.3 Pola Segi empat



Apa pun bentuk beritanya, ia tetap harus memiliki enam elemen, yaitu *who* (pelaku dari peristiwa), *what* (kejadian yang layak menjadi berita), *where* (tempat kejadian), *when* (waktu kejadian), *how* (fakta yang mendukung kejadian yang

layak menjadi berita), dan *why* (pendapat dari ahli yang menjelaskan kejadian) (Burns, 2013: 107).

2.4 Konsep Hubungan Internasional

Brown dan Ainley (2005:1) mengatakan agak sulit untuk mendefinisikan kata “hubungan internasional” secara akademis. Sebab, menurut mereka “*real world*” atau dunia selalu berinteraksi dengan kehidupan akademis. Sependapat dengan Brown dan Ainley, Ghosh (2013:2) juga mengatakan bahwa memang sulit mendefinisikan “hubungan internasional” yang sering dikaitkan dengan politik internasional.

Oleh karena itu, Devetak, Burke, dan George (2012:2) melihat ada tiga poin yang perlu diketahui sebelum mendefinisikan “hubungan internasional”. Pertama, studi hubungan internasional tidak harus disandingkan dengan “peristiwa saat ini”. Hal ini penting untuk tidak mengecilkan pengertian “hubungan internasional” disesuaikan dengan *headline* yang ada di media global. Kedua, studi hubungan internasional tidak bisa hanya digambarkan melalui apa yang terjadi di negara-negara tertentu. Dalam hubungan internasional, apa pun kepentingan politik dari negara akan berdampak pada lingkungan internasional. Ketiga, hubungan internasional tidak bisa dikatakan hanyalah sebuah analisis kebijakan luar negeri—meskipun terkadang ini bisa jadi merupakan bagian dari hubungan internasional.

Lalu, untuk mendalami pengertian “hubungan internasional”, Ghosh (2013: 2-3) mengutip beberapa sumber.

Tabel 2.4 Definisi Hubungan Intenasional

Tokoh	Definisi
Hans Morgenthau (1978)	“Inti dari hubungan internasional adalah melakukan politik internasional, dan subjek permasalahan politik internasional adalah untuk perebutan kekuasaan negara-negara berdaulat.”
Norman J. Lincoln dan George A. Padelford (1967)	“Ketika orang membicarakan hal terkait hubungan internasional, biasanya mereka memikirkan hubungan antarnegara. Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa hubungan antarnegara tersebut merupakan ‘politik internasional’ yang berarti adanya interaksi dari kebijakan negara dalam perubahan pola dari hubungan kekuasaan.”
N.D Perkins dan H.C Palmer (2001)	“Hubungan internasional tidak hanya terkait politik dari komunitas internasional yang berpegangan pada diplomasi dan hubungan antarnegara dengan unit politik. Hubungan internasional berarti keseluruhan hubungan antara orang dan grup dari masyarakat dunia.”
Frederick S. Dunn (1948)	“Hubungan internasional bisa dipandang sebagai hubungan yang melintasi batas-batas nasional, dan memiliki hubungan tersebut pada waktu tertentu.”

Sementara, definisi “hubungan internasional” yang tertera pada UU No. 37 Tahun 1999 pasal 1 tentang Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Kemudian, ada empat poin lainnya yang menjadi ketentuan umum dalam menjelaskan undang-undang tersebut. Di antaranya adalah “politik luar negeri”

yang dijelaskan sebagai kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Ada juga “perjanjian internasional”, yaitu perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selain itu, ada aktornya, yaitu “menteri” adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, juga “Organisasi Internasional” adalah organisasi antar pemerintah.

Singkatnya, untuk menjelaskan hubungan internasional, terkait aksinya (politik luar negeri) yang menghasilkan perjanjian internasional. Hubungan luar negeri tak lepas dari aktornya (menteri dan organisasi internasional).

2.4.1 Hubungan Indonesia-Australia

Disarikan dari Thornton, dkk. (2004:175-185) menjelaskan bahwa Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi merupakan bukti adanya hubungan tersebut. Juga terdapat hubungan sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini sudah lama dimulai dalam sejarah manusia. Namun sulit

untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan antara Australia-Indonesia itu dimulai.

Thornton, dkk menjelaskan hubungan Indonesia-Australia berdasarkan waktu menjadi tiga bagian besar, yaitu hubungan pada zaman kolonial, hubungan sebelum dan pascakemerdekaan, dan hubungan setelah tahun 1966.

1) Hubungan pada zaman penjajahan

Tahun 1788 sampai dengan tahun 1901 merupakan zaman penjajahan Inggris. Negara-negara bagian di Australia diperintah oleh para gubernur yang ditunjuk oleh Pemerintah Inggris. Pada saat itu, Indonesia berada di bawah jajahan Belanda. Hubungan antara Australia dan Indonesia dikendalikan oleh Inggris dan Belanda.

Sejak tahun 1790 dan seterusnya, Belanda dan Inggris memperluas perdagangan mereka di seluruh dunia. Mulailah berkembang jalur pelayaran tetap antara Australia dan Indonesia yang berlangsung hingga ke abad ke-19 dengan adanya perdagangan.

Ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942, dibentuklah pemerintahan Kolonial Belanda dalam pengasingan di Australia. Sebagai anggota tentara Sekutu, Belanda dan pemerintahannya yang dalam pengasingan tersebut mendapatkan kekuasaan ekstra teritorial serta dibantu oleh Pemerintah Australia.

Pada tahun 1943 Belanda mengangkut 500 orang lebih ke Australia, baik pria, wanita dan anak-anak, dari perkampungan tawanan di Tanah Merah. Juga, Belanda bermaksud untuk mengasingkan para tawanan ini di

Australia. Akhirnya, para tawanan ini juga membantu orang-orang Indonesia yang terdampar di Australia akibat Perang Dunia, untuk mengatur pemberian dukungan bagi negaranya.

2) Hubungan pada pascakemerdekaan

Sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Australia merupakan salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka.

Australia juga membantu para pejuang nasionalis Indonesia dalam perjuangan mereka mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1947, Indonesia meminta Australia untuk mewakili Indonesia dalam Komisi Tiga Negara yang diusahakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Australia mewakili Indonesia dalam perundingan-perundingan yang menuju ke pengakuan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1949. Australia juga mensponsori masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950.

Australia dan Indonesia tetap menjaga hubungan baik sejak saat itu. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan pendapat. Salah satu perbedaan tersebut berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda atas Irian Barat (Irian Jaya sekarang).

Antara tahun 1959 dan tahun 1962 Pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat. Masalah tersebut di atas menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Akhirnya dirundingkanlah penyelesaian pada tahun 1962,

dengan bantuan PBB, dan Irian Jaya menjadi propinsi Indonesia yang ke-26.

Sejak tahun 1962, Australia telah mengakui Irian Jaya (yang sejak awal tahun 2002 disebut Papua) sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Setelah konflik Papua berakhir, dalam periode tahun 1963-1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi Indonesia.

Australia waktu itu terus mendukung Malaysia. Sebab, sebagai sebuah negara Persemakmuran, Malaysia mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Australia. Selain itu, Australia mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia serta adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut terpecahkan dengan adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya Presiden Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia

memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia.

3) Hubungan setelah tahun 1966

Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia. Hubungan kita telah berkembang semakin luas dan semakin dalam, termasuk perkembangan bidang pariwisata. Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Kepariwisata telah menjadi cara yang penting untuk meningkatkan pengetahuan orang Australia tentang bahasa dan budaya Indonesia.

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 telah ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Setelah dilakukan jajak pendapat di Timor Timur yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesuai dengan Perjanjian Tripartit yang ditandatangani oleh Indonesia dan Portugis, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%) pada tanggal 30 Agustus 1999,

Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia

memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemeliharaan keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini.

Keterlibatan Australia dalam konflik ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk memandang ke depan, bukan ke belakang, disertai semangat yang positif, dan keduanya sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa telah semakin meningkat. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia.

Sehubungan dengan hal tersebut, sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi.

2.5 Konstruksi Sosial

Bungin (2011:11) mengutip Ritze (1992:5) menjelaskan bahwa ide dasar semua teori dalam paradigma definisi sosial sebenarnya berpandangan bahwa manusia adalah aktor kreatif dari realitas sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan

sebagainya—yang semuanya tercakup dalam fakta sosial. Fakta sosial dijelaskan sebagai tindakan yang tergambar struktur dan pranata sosial.

Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya—tempat individu tersebut berasal. Manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui respons-respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Bungin (2011:12) memaparkan bahwa realitas sosial itu ‘ada’ dilihat dari subyektivitas ‘ada’ itu sendiri dan dunia objektif di sekeliling realitas sosial itu. Individu tidak hanya dilihat sebagai ‘kedirian’-nya, namun juga dilihat dari mana ‘kedirian’ itu berada, bagaimana ia menerima dan mengaktualisasikan dirinya serta bagaimana pula lingkungan menerimanya. Bisa dikatakan, pada kenyataannya realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalamnya maupun di luar realitas tersebut. Realitas itu memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif.

2.5.1 Konstruksi atas Realitas

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger. Eriyanto (2002:13-14) memaparkan bahwa tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk

manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat.

Proses dialektis dijelaskan oleh Eriyanto (2002:14-15) mempunyai tiga tahapan. Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental ataupun fisik.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan ekstranalisasi manusia tersebut. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis*. Hasil ekstranalisasi—kebudayaan—itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa.

Ketiga, internalisasi. Proses ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.

Eriyanto (2002:15) mengutip Azca (1994:16-17) menjelaskan bahwa realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi berbeda-beda atas suatu realitas.

Selain plural, konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka realitas tersebut merupakan realitas subjektif dan realitas sosial sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan obyek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda

pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu juga mempunyai dimensi objektif—sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar.

Gagasan Berger mengenai konstruksi realitas ini dalam konteks berita dijelaskan Eriyanto (2002:17) sebagai sebuah teks berupa berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi atas realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita.

Oleh karena itu, jika dilihat dari pendekatan konstruksionis, hubungan media, wartawan, dan berita memiliki penilaian yang sedikit berbeda. Penilaian tersebut akan diuraikan satu per satu oleh Eriyanto (2002:19-36):

- Fakta/Peristiwa adalah Hasil Konstruksi

Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.

- Media adalah Agen Konstruksi

Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekadar saluran yang bebas menyalurkan informasi, ia juga subjek yang

mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Dengan cara apa? Media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa.

- **Berita Bukan Refleksi dari Realitas. Ia Hanyalah Konstruksi dari Realitas**

Menurut konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas.

- **Berita Bersifat Subjektif/Konstruksi atas Realitas**

Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber lain; menempatkan wawancara seorang tokoh lebih besar dari tokoh lain; liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain; tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok, kesemuanya tidaklah dianggap sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan oleh wartawan.

- **Wartawan Bukan Pelapor. Ia Agen Konstruksi Realitas**

Dalam pandangan konstruksionis, wartawan juga dipandang sebagai aktor atau agen konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta,

melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.

- Etika, Pilihan Moral dan Keberpihakan Wartawan adalah Bagian yang Integral dalam Produksi Berita

Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya—apa yang dia lihat. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu—umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu—adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas.

- Nilai, Etika, dan Pilihan Moral Peneliti menjadi Bagian yang Integral dalam Penelitian

Salah satu sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruktisionis adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian.

- Khalayak Mempunyai Penafsiran Sendiri atas Berita

Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Menurut Stuart Hall yang dikutip Eriyanto (2002:36) makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan atau berita yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial mempunyai banyak arti (*polisemi*). Makna lebih tepat

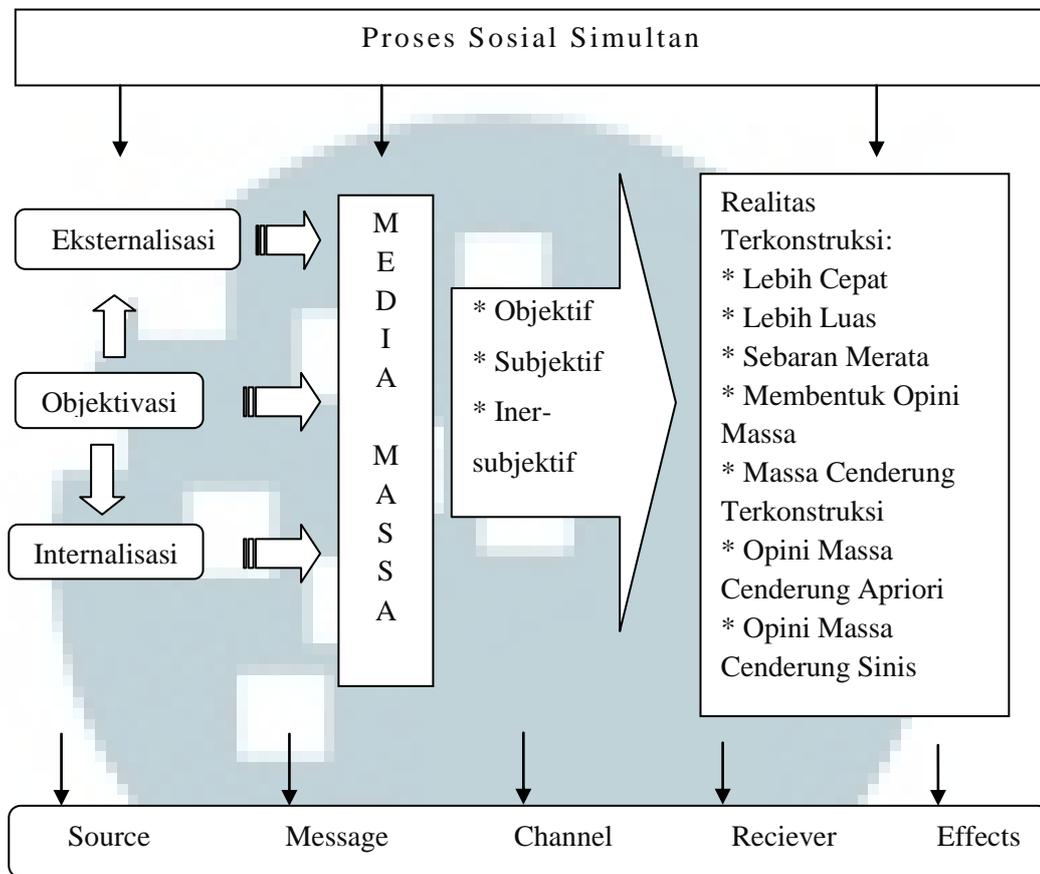
dipahami bukan sebagai suatu transmisi (penyebaran) dari pembuat berita ke pembaca. Ia lebih tepat dipahami sebagai suatu praktik penandaan. Karenanya, setiap orang bisa mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang sama.

2.6 Konstruksi Sosial Media Massa

Bungin (2009: 206) menjelaskan bahwa saat pertama kali teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckmann diperkenalkan pada tahun 1960-an, media massa belum menjadi fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Oleh karena itu, Berger dan Luckmann tidak memasukkan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Teori Berger dan Luckmann ini kemudian direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Substansinya adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata.

U
M
M
N

Gambar 2.6 Proses Konstruksi Sosial Media Massa



Menurut Bungin (2009:207-216), proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi. Tahapan ini merupakan tugas redaksi media massa yang didistribusikan pada *desk editor*. Masing-masing media memiliki *desk editor* yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan dengan tiga hal, yaitu kedudukan, harta, dan perempuan. Selain tiga hal itu juga ada fokus-fokus lain, seperti informasi yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang, yaitu persoalan-persoalan sensitivitas, sensualitas, maupun kengerian.

Kedua, tahap sebaran konstruksi. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real time*. Strategi sebaran konstruksi media massa bisa dilihat dalam segmentasi dan pilihan sumber informasi. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media.

Ketiga, tahap pembentukan konstruksi realitas. Tahapan ini menunjukkan pemberitaan telah sampai pada pembaca dengan terjadinya pembentukan konstruksi di masyarakat yang melalui tiga tahap:

a) Konstruksi membenaran

Tahapan ini sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran.

b) Kesiediaan dikonstruksi oleh media massa

Tahapan ini merupakan sikap generik dari tahap yang pertama. Bawa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa.

c) Menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif

Tahap ini menggambarkan bahwa seseorang secara *habit* tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiassan hidup yang tak bisa

dilepaskan. Pada tingkatan tertentu, seseorang merasa tak mampu beraktivitas, apabila ia belum membaca koran.

Keempat, tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Misalnya, kedekatan dengan media massa adalah *lifestyle* orang modern yang menyukai popularitas, terutama menjadi subjek media massa itu sendiri.

2.7 Framing

Pengertian *framing* dijelaskan oleh Eriyanto (2002: 66) sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.

2.7.1 Konsep Framing

Sobur (2012:161) mengutip buku yang ditulis Sudibyo (1999:23) mengatakan bahwa gagasan *framing* yang pertama kali dilontar oleh Beterson pada tahun 1955. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan

wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1975, yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Sobur (2012:162) mengutip wacana yang ditulis Sudibyo (1999:176) menjelaskan, dalam ranah komunikasi, analisis *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau perspektif fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang *framing* atau *frame* sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif (komunikasi).

Sobur (2012:162) mengutip Nugroho, Eriyanto, dan Sudiarsis (1999:21) menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Dalam menjelaskan definisi *framing*, Eriyanto (2002:67) meringkasnya dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Definisi *Framing*

Tokoh	Definisi
Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi— informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (<i>package</i>). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow and Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. <i>Frame</i> mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam

	kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. <i>Frame</i> mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

2.7.2 Aspek *Framing*

Ada dua aspek dalam *framing* menurut Eriyanto (2002:69-70). Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angle* tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas.

Pemilihan kata, kalimat, atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas.

2.7.3 Analisis *Framing*

Analisis *framing* secara sederhana digambarkan oleh Eriyanto (2002:3) sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Bagaimana media dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal inilah yang menjadi pusat perhatian analisis *framing*. Praktisnya, ia digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media.

Sobur (2012:166) berpendapat bahwa salah satu yang menjadi prinsip analisis *framing* adalah bahwa wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skematya interpretasi (*schemata of interpretation*).

Sobur (2012:166-167) mengutip Hamad (2001:57-58) menjelaskan, pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, di antaranya realitas politik. Pada umumnya, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media massa (setiap orang yang bekerja pada sebuah organisasi media).

Pertama, dalam hal pilihan kata (simbol) politik. Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, namun telah menjadi sifat dari pembicaraan politik yang selalu memperhitungkan simbol politik. Dalam konteks ini, sekalipun melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media massa tetap terlibat—langsung ataupun tidak langsung—dengan pilihan simbol yang digunakan sumber tersebut.

Kedua, dalam melakukan pembingkaiian (*framing*) peristiwa politik. Minimal oleh sebab adanya tuntutan teknis: keterbatasan-keterbatasan kolom dan halaman (pada media cetak) atau waktu (pada media elektronika), jarang ada media yang membuat berita sebuah peristiwa secara utuh, mulai dari menit pertama kejadian hingga ke menit paling akhir. Atas nama kaidah jurnalistik, peristiwa yang panjang, lebar, rumit dicoba “disederhanakan” melalui pembingkaiian (*framing*) fakta-fakta dalam bentuk berita sehingga layak terbit atau layak tayang. Untuk kepentingan pemberitaan ini, komunikator massa sering kali hanya menyoroti hal-hal yang “penting” (mempunyai nilai berita) dari sebuah peristiwa politik. Dari segi ini saja, mulai terlihat ke arah mana pembentukkan kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang diuntungkan) dengan berita tersebut.

Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peristiwa politik. Justru hanya jika media massa memberi tempat pada sebuah peristiwa politik, maka peristiwa akan memperoleh perhatian dari masyarakat. Pada konteks ini media massa memiliki fungsi *agenda setter* sebagaimana yang dikenal dengan Teori

Agenda Setting. Tesis utama teori ini adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat bergantung seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut.

2.7.4 Efek *Framing*

Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan dan kepada khalayak. Dari definisi yang sederhana yang diungkapkan Eriyanto (2002:139) ini saja sudah tergambar apa efek *framing*. Sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Realitas begitu kompleks, penuh dimensi, ketika dimuat dalam berita bisa menjadi realitas satu dimensi. Kalau saja ada realitas dalam arti yang obyektif, bisa jadi apa yang ditampilkan dan dibingkai oleh media berbeda dengan realitas obyektif tersebut.

Framing menyediakan alat bagaimana peristiwa itu dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Karena itu *framing* menolong khalayak untuk memproses informasi ke dalam kategori yang dikenal, kata-kata kunci, dan citra tertentu.

Efek *framing* yang dibangun oleh media terhadap realitas (Eriyanto, 2002:141-14):

- Menonjolkan Aspek Tertentu-Mengaburkan Aspek lain

Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut dengan fokus. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

- Menampilkan Sisi Tertentu-Melupakan Sisi Lain

Dengan menampilkan sisi seperti ini dalam berita, ada sisi lain yang dilupakan. Di sini, menampilkan aspek tertentu menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita.

- Menampilkan Aktor Tertentu-Menyembunyikan Aktor Lainnya

Berita seringkali juga memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu. Ini tentu saja tidak salah. Tetapi efek yang segera terlihat adalah memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi.

2.8 Kerangka Pemikiran

